

Peran Efektivitas Sistem Informasi dalam Memperkuat Tata Kelola Keuangan pada Instansi Pemerintah

Ari Hadi Prasetyo^{1*}, Iwan Darmawansyah², Nurlela³
Akuntansi, STIE Tunas Nusantara, Indonesia

Corresponding Author: arihadiprasetyo@gmail.com

Published: Januari 2026

ABSTRACT

Digital transformation in the public sector requires financial information systems to not only function administratively, but also to strengthen transparency, accountability, and control. In practice, these benefits do not always materialise if the system is not effective for users, thus requiring empirical studies to assess its role in financial governance. This study aims to analyse the effect of Information System Effectiveness on Financial Governance in public sector financial management agencies in Indonesia. The research uses a quantitative approach with an explanatory type and a cross-sectional survey design. The research population consists of all employees involved in financial management and using financial information systems in the agencies studied. The sampling technique uses purposive sampling with the criteria of active users of financial information systems, resulting in a sample of 120 respondents. Data were collected through a Likert scale questionnaire and analysed using PLS SEM with the help of SmartPLS through measurement model and structural model evaluation. The results show that information system effectiveness plays a role in strengthening financial governance because it supports the availability of more accurate, consistent, and timely information, thereby improving the orderliness of financial reporting, supervision, and control. The implications of this study emphasise the importance of improving information quality, system integration, and user training support in order to strengthen and sustain financial governance.

Keywords: information system effectiveness, financial governance, SmartPLS, PLS SEM, public sector

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor publik membuat sistem informasi keuangan bukan lagi sekadar alat administratif, melainkan infrastruktur utama untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan pemerintahan elektronik dan teknologi informasi berpotensi mendorong keterbukaan serta mengurangi praktik korupsi melalui akses informasi yang lebih luas dan jejak data yang lebih jelas (Andersen, 2009; Bertot et al., 2010). Namun, realitas implementasi sering belum sejalan dengan rancangan ideal karena kompleksitas proses, kebutuhan integrasi antar unit, serta keterbatasan kapasitas pengguna dapat menurunkan manfaat sistem, bahkan memunculkan risiko seperti data tidak konsisten, keterlambatan pelaporan, atau kontrol yang lemah. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas sistem informasi dan dampaknya terhadap tata kelola keuangan menjadi penting dan perlu segera dilakukan agar investasi digital benar benar menghasilkan perbaikan tata kelola yang terukur, bukan hanya sebatas keberadaan sistem.

Objek penelitian ini difokuskan pada unit atau instansi pengelola keuangan sektor publik yang mengoperasikan sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi, seperti Government Financial Management Information System (GFMIS) atau Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Pemilihan objek ini relevan karena proses pengelolaan keuangan publik memiliki tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi, melibatkan banyak pemangku kepentingan, serta berada dalam pengawasan audit dan regulasi yang ketat, sehingga kualitas tata kelola dapat diamati melalui indikator

transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan pengendalian. Dibandingkan organisasi sektor privat, instansi publik menghadapi tekanan legitimasi publik dan kewajiban pelaporan yang lebih formal. Dibandingkan instansi sejenis yang masih menggunakan sistem terfragmentasi, objek penelitian ini memungkinkan evaluasi manfaat sistem terintegrasi pada rangkaian proses keuangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Konteks pemerintah lokal juga relevan karena penelitian terdahulu menunjukkan dinamika tata kelola, transparansi, dan praktik teknologi informasi di level lokal memiliki karakteristik tersendiri.

Secara konseptual, penelitian ini menghubungkan Efektivitas Sistem Informasi (ISE) sebagai variabel independen dengan Tata Kelola Keuangan (FG) sebagai variabel dependen. Kerangka keberhasilan sistem informasi dari DeLone dan McLean menekankan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi akan memengaruhi penggunaan, kepuasan pengguna, hingga manfaat bersih yang dirasakan organisasi (DeLone & McLean, 2003). Dalam konteks keuangan publik, manfaat bersih tersebut tercermin pada meningkatnya transparansi data keuangan, ketepatan waktu pelaporan, kemudahan pengawasan, dan penguatan kontrol internal yang pada akhirnya memperkuat tata kelola. Literatur evaluasi keberhasilan sistem informasi juga menegaskan pentingnya mengukur efektivitas secara multidimensi dan konsisten agar hubungan sebab akibat antar konstruk dapat ditafsirkan dengan lebih kuat (Petter et al., 2008).

Meskipun hubungan teknologi informasi dengan transparansi dan akuntabilitas telah banyak dibahas, masih terdapat kesenjangan penelitian. Studi lintas negara menunjukkan bahwa pemerintahan elektronik dapat berkontribusi pada penurunan korupsi (Andersen, 2009) dan membangun kultur transparansi (Bertot et al., 2010), tetapi temuan makro semacam ini sering belum menjelaskan mekanisme mikro di level organisasi, terutama bagaimana efektivitas sistem yang dirasakan pengguna benar benar diterjemahkan menjadi praktik tata kelola keuangan yang lebih baik. Penelitian pada pemerintah lokal juga menyoroti peran tata kelola teknologi informasi terhadap transparansi dan akuntabilitas (Sofyani et al., 2020), namun fokusnya kerap pada tata kelola teknologi informasi sebagai penghubung, bukan pada efektivitas sistem informasi keuangan sebagai pendorong langsung tata kelola keuangan. Selain itu, penelitian terbaru tentang IFMIS menekankan dampak implementasi pada akuntabilitas sektor publik (Attigbo et al., 2025), tetapi ruang untuk menguji pengaruhnya pada tata kelola keuangan yang lebih komprehensif masih terbuka. Tinjauan mutakhir juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam riset pemerintah lokal sering belum menjadi pusat agenda empiris, sehingga dibutuhkan studi yang menempatkannya sebagai konsekuensi nyata dari desain dan efektivitas sistem (Aquino, 2024). Di sisi lain, tinjauan meta menegaskan model keberhasilan sistem informasi belum selalu diterapkan secara konsisten lintas studi, sehingga dibutuhkan bukti empiris yang lebih terarah pada konteks spesifik (Jeyaraj, 2020).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pengukuran efektivitas sistem informasi, bukan sekadar adopsi atau keberadaan sistem, serta pengujian dampaknya terhadap tata kelola keuangan sebagai konstruk yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan pengendalian keuangan. Manfaat penelitian ini diharapkan bersifat teoritis, yaitu memperkuat bukti empiris keterkaitan efektivitas sistem informasi dengan tata kelola di sektor publik, serta bersifat praktis, yaitu memberikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan tata kelola proses keuangan berbasis data. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh efektivitas sistem informasi terhadap tata kelola keuangan pada objek yang diteliti, serta menghasilkan implikasi perbaikan implementasi agar peningkatan akuntabilitas dan transparansi dapat terjadi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, yaitu bertujuan menjelaskan pengaruh variabel Efektivitas Sistem Informasi (ISE) terhadap Tata Kelola Keuangan (FG). Desain penelitian bersifat survei dengan pengambilan data pada satu waktu (cross sectional). Analisis hubungan antar konstruk dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling melalui aplikasi SmartPLS, karena pendekatan ini sesuai untuk pengujian model prediktif, bekerja baik pada model dengan konstruk laten berbasis indikator, serta umum digunakan dalam riset manajemen dan sistem informasi (Hair et al., 2019).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada instansi atau unit sektor publik yang menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Waktu penelitian meliputi tahap penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian (bulan dan tahun pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi penelitian).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh melalui kuesioner kepada responden yang menggunakan sistem informasi keuangan pada instansi yang diteliti.
2. Data sekunder, berupa dokumen pendukung seperti pedoman pengelolaan keuangan, SOP, laporan internal, serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat konteks penelitian.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan menggunakan sistem informasi keuangan pada instansi yang diteliti, seperti bendahara, staf keuangan, operator aplikasi, verifikator, pejabat penatausahaan keuangan, serta unit pengawasan internal terkait.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden:

1. Menggunakan sistem informasi keuangan dalam pekerjaan rutin.
2. Memiliki pengalaman penggunaan sistem minimal beberapa bulan sehingga mampu menilai efektivitas sistem secara memadai.

Jumlah sampel ditetapkan dengan mempertimbangkan kecukupan daya uji dan ketepatan estimasi dalam PLS SEM. Penentuan minimum ukuran sampel dapat merujuk pada metode yang direkomendasikan dalam PLS SEM seperti inverse square root dan gamma exponential untuk memastikan sampel memadai dalam mendeteksi pengaruh jalur secara stabil (Kock & Hadaya, 2018). Secara praktis, penelitian ini menargetkan jumlah responden yang memadai untuk menghasilkan estimasi bootstrapping yang stabil dan pelaporan model yang baik sesuai pedoman PLS SEM (Hair et al., 2019).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua konstruk laten reflektif, yaitu:

1. Efektivitas Sistem Informasi (ISE) sebagai variabel independen
ISE menggambarkan sejauh mana sistem informasi menghasilkan informasi yang berkualitas, mudah digunakan, andal, serta mendukung kebutuhan kerja pengguna. Konseptualisasi efektivitas sistem merujuk pada kerangka keberhasilan sistem informasi yang menekankan kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih yang dirasakan organisasi (DeLone & McLean, 2003; Petter et al., 2008).
2. Tata Kelola Keuangan (FG) sebagai variabel dependen
FG merefleksikan kualitas tata kelola dalam pengelolaan keuangan yang tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, serta efektivitas pengendalian dan pelaporan keuangan. Indikator disusun sesuai konteks organisasi sektor publik dan tujuan penelitian.

Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat, yaitu 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Kuesioner memuat pernyataan indikator untuk masing masing konstruk, yaitu indikator ISE (ISE1 sampai ISE6) dan indikator FG (FG1 sampai FG6).

Untuk meminimalkan bias metode umum, proses pengumpulan data menerapkan anonimitas responden, penjelasan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah, serta penyusunan item yang jelas

dan tidak menggiring, sesuai rekomendasi pengendalian common method bias dalam penelitian perilaku (Podsakoff et al., 2003).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan PLS SEM dengan tahapan evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Pelaporan dan interpretasi hasil mengikuti pedoman pelaporan PLS SEM yang lazim pada riset manajemen dan sistem informasi (Hair et al., 2019).

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan indikator valid dan reliabel dalam mengukur konstruk.

1. Validitas konvergen
Validitas konvergen dinilai melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted. Indikator dinilai baik apabila outer loading tinggi dan nilai Average Variance Extracted melampaui 0,50, karena menunjukkan indikator mampu menjelaskan varians konstruk secara memadai (Hair et al., 2019; Fornell & Larcker, 1981).
2. Validitas diskriminan
Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell Larcker dan dapat dilengkapi dengan heterotrait monotrait ratio untuk memastikan setiap konstruk benar benar berbeda dari konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981; Henseler et al., 2015).
3. Reliabilitas konstruk
Reliabilitas konstruk dinilai melalui Cronbach alpha dan composite reliability. Nilai reliabilitas yang memadai menunjukkan konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk (Cronbach, 1951; Hair et al., 2019).

Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural bertujuan menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antar konstruk.

1. Koefisien determinasi (R^2)
 R^2 digunakan untuk menjelaskan proporsi variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen, sehingga menunjukkan kekuatan prediksi model (Hair et al., 2019).
2. Signifikansi koefisien jalur
Signifikansi diuji menggunakan prosedur bootstrapping untuk memperoleh nilai t statistik dan p value. Bootstrapping secara konseptual merujuk pada teknik resampling yang diperkenalkan dalam kajian statistik dan lazim digunakan untuk inferensi yang robust (Efron, 1979; Hair et al., 2019).
3. Ukuran efek (f^2)
 f^2 digunakan untuk menilai besarnya kontribusi variabel independen terhadap kemampuan prediktif variabel dependen. Interpretasi kategori ukuran efek dapat merujuk pada konvensi analisis power dan pedoman pelaporan PLS SEM (Cohen, 1992; Hair et al., 2019).
4. Relevansi prediktif (Q^2)
 Q^2 dapat digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model apabila penelitian menekankan aspek prediktif dan ketepatan prediksi konstruk dependen (Hair et al., 2019).

Kriteria Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji berdasarkan hasil bootstrapping pada koefisien jalur. Keputusan penerimaan hipotesis mengacu pada nilai t statistik yang melampaui nilai kritis dan p value yang lebih kecil dari 0,05, sesuai praktik pelaporan inferensi pada PLS SEM (Hair et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Menilai Outer Model atau Measurement Model

Dalam analisis data menggunakan SmartPLS, outer model dinilai melalui tiga kriteria utama yaitu convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Convergent validity memastikan indikator mampu menjelaskan konstruk dengan baik, discriminant validity menegaskan perbedaan antar konstruk agar tidak saling tumpang tindih, sedangkan composite reliability mengukur konsistensi indikator dalam merepresentasikan variabel laten. Ketiga kriteria ini penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas model penelitian sebelum dilakukan pengujian hipotesis.

Convergent Validity

Convergent validity pada model pengukuran dengan indikator reflektif dinilai dari seberapa kuat korelasi antara item score atau component score yang diestimasi melalui software PLS dengan konstruk yang diukur. Sebuah indikator reflektif dianggap memiliki validitas konvergen yang baik apabila nilai korelasinya melebihi 0,70.

Tabel 1. Outer Loadings (Measurement Model)

Indikator	Financial Governance (FG)	Information System Effectiveness (ISE)
FG1	0,729	
FG2	0,801	
FG3	0,766	
FG4	0,722	
FG5	0,713	
FG6	0,709	
ISE1		0,795
ISE2		0,801
ISE3		0,715
ISE4		0,727
ISE5		0,711
ISE6		0,715

Berdasarkan hasil analisis dengan SmartPLS pada Tabel 1, diperoleh bahwa nilai outer model (korelasi antara konstruk dan indikatornya) telah memenuhi syarat convergent validity. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh indikator memiliki nilai loading factor **lebih besar dari 0,70**. Dengan demikian, model penelitian ini dapat dinyatakan valid secara konvergen.

Discriminant Validity

Discriminant validity bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk pada variabel laten benar-benar memiliki perbedaan yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dengan konstruk lainnya.

Tabel 2. Nilai Discriminant Validity (Fornell–Larcker)

	Financial Governance (FG)	Information System Effectiveness (ISE)
Financial Governance (FG)	0,741	
Information System Effectiveness (ISE)	0,947	0,745

Composite Reliability

Evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas konstruk dapat dilakukan dengan melihat nilai reliabilitas konstruk serta nilai Average Variance Extracted (AVE) pada setiap variabel laten. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilai reliabilitasnya mencapai setidaknya 0,70, sedangkan nilai AVE di atas 0,50 menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan sebagian besar varians dari konstruk yang diukur.

Tabel 3. Nilai Composite Reliability

Konstruk	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Financial Governance (FG)	0,835	0,836	0,879	0,549
Information System Effectiveness (ISE)	0,839	0,843	0,882	0,555

Merujuk pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan reliabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai composite reliability yang berada di atas 0,70 serta nilai AVE yang melampaui 0,50. Dengan demikian, instrumen penelitian yang digunakan dinilai konsisten dan mampu menggambarkan variabel laten secara tepat dan memadai.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk menilai keterkaitan antar konstruk, tingkat signifikansi, serta nilai R-square pada model penelitian. Nilai R-square menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4. Nilai R-Square

Variabel Dependen	R-square	Adjusted R-square
Financial Governance (FG)	0,896	0,895

Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai R-square sebesar 0,896 pada Financial Governance menunjukkan bahwa 89,6% variasi tata kelola keuangan dapat dijelaskan oleh efektivitas sistem informasi, sementara sisanya 10,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted R-square yang hampir sama dengan R-square menunjukkan bahwa model penelitian bersifat stabil dan memiliki daya jelas yang sangat tinggi. Dengan demikian, efektivitas sistem informasi berperan dominan dalam memperkuat tata kelola keuangan sesuai fokus penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Langsung (Parsial)

Pengaruh langsung (parsial) dalam SmartPLS merujuk pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tanpa melibatkan variabel mediasi. Suatu pengaruh dinyatakan signifikan apabila $t > 1,968$ dan $p\text{-value} < 0,05$.

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Langsung (Parsial)

Jalur Pengaruh	Koefisien Jalur (O)	Rata-rata (M)	STDEV	t-statistik	p-value	Keputusan
ISE → FG	0,947	0,946	0,014	69,440	0,000	Signifikan (H1 diterima)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai t-statistik = 69,440 ($> 1,968$) dan p-value = 0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Efektivitas Sistem Informasi (ISE) terhadap Tata Kelola Keuangan (FG) adalah positif dan signifikan.

Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi terhadap Tata Kelola Keuangan

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,947, t-statistik sebesar 69,440, serta p-value sebesar 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis diterima, sehingga semakin efektif sistem informasi yang diterapkan, maka semakin kuat tata kelola keuangan organisasi, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ketepatan pelaporan, dan efektivitas pengendalian keuangan berbasis data yang akurat dan tepat waktu.

Effect Size (f square)

Effect size (f^2) digunakan untuk menilai besarnya pengaruh spesifik dari variabel independen terhadap kemampuan prediktif variabel dependen.

Tabel 6. Effect Size (f square)	
Pengaruh	f-square
ISE -> FG	8,604

Berdasarkan hasil tabel, pengaruh efektivitas sistem informasi terhadap tata kelola keuangan memiliki nilai f^2 sebesar 8,604, yang jauh melebihi batas $f^2 \geq 0,35$, sehingga termasuk dalam kategori efek besar. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap kemampuan prediktif tata kelola keuangan dalam model penelitian.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi dipahami sebagai kondisi ketika sistem mudah digunakan, andal, terintegrasi, serta mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengguna. Dalam kerangka keberhasilan sistem informasi, kondisi tersebut dipandang sebagai prasyarat munculnya manfaat organisasi (net benefits) yang dapat dirasakan pada level proses dan pengendalian, termasuk pada fungsi pengelolaan keuangan (DeLone & McLean, 2003). Selain itu, pendekatan evaluasi konstruk yang umum dalam riset PLS SEM menekankan pentingnya memastikan kualitas pengukuran sebelum menarik kesimpulan pada hubungan antarvariabel, sehingga pembahasan hasil penelitian perlu diarahkan pada makna substantif dari hubungan yang ditemukan, bukan pada angka statistik (Hair et al., 2019). Temuan penelitian ini menguatkan argumen bahwa sistem informasi yang efektif cenderung mendorong perbaikan tata kelola keuangan. Secara teoritis, model keberhasilan sistem informasi menempatkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebagai fondasi yang membentuk penggunaan dan kepuasan pengguna, yang pada akhirnya menghasilkan manfaat bersih bagi organisasi (DeLone & McLean, 2003; Petter et al., 2008). Dalam konteks pengelolaan keuangan, manfaat bersih tersebut dapat termanifestasi dalam proses yang lebih tertib, konsistensi prosedur, keterlacakan transaksi, dan dukungan pengawasan, sehingga transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta kontrol internal menjadi lebih kuat.

Temuan ini juga sejalan dengan literatur digitalisasi tata kelola sektor publik yang menekankan bahwa pemanfaatan TIK dan e government berpotensi memperkuat keterbukaan dan mengurangi ruang penyimpangan, terutama ketika informasi lebih mudah diakses dan jejak data lebih jelas (Andersen, 2009; Bertot et al., 2010). Jika sistem informasi keuangan dipersepsikan efektif, maka informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih siap pakai untuk kebutuhan pelaporan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, yang kemudian memperkuat praktik tata kelola keuangan. Dukungan empiris juga terlihat pada studi sektor publik terkait sistem informasi keuangan terintegrasi. Penelitian mengenai reformasi manajemen keuangan publik menunjukkan bahwa sistem terintegrasi seperti IFMIS dirancang untuk menstandarkan proses, memperkuat kontrol, dan meningkatkan akuntabilitas (Tetteh et al., 2021). Studi terbaru juga menegaskan keterkaitan penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi dengan penguatan akuntabilitas sektor publik, terutama melalui mekanisme audit trail, peningkatan keterlacakan, dan pengurangan praktik diskresi yang tidak terdokumentasi (Attigbo et al., 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa efektivitas sistem informasi bukan hanya isu teknis, melainkan faktor yang dapat memperkuat tata kelola keuangan sebagai praktik organisasi.

Walaupun penelitian ini menunjukkan hubungan yang menguatkan tata kelola keuangan, literatur juga memperlihatkan bahwa dampak teknologi terhadap tata kelola dan antikorupsi tidak selalu konsisten pada semua konteks. Tinjauan sistematis tentang e government dan korupsi menemukan adanya ragam hasil dan mekanisme yang berbeda, sehingga hubungan e government dan korupsi tidak dapat diperlakukan sebagai hubungan linear yang selalu sama pada setiap negara atau institusi (Khan et al., 2021). Ini mengisyaratkan bahwa efektivitas sistem dan dampaknya pada tata kelola sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi, kapasitas organisasi, serta tata kelola data. Pada level organisasi, riset MIS Quarterly menunjukkan bahwa teknologi dapat memiliki potensi antikorupsi, tetapi realisasi potensinya sering dibatasi oleh dinamika institusional, praktik informal, dan penyesuaian aktor di lapangan (Addo & Avgerou, 2021). Artinya, sistem bisa saja tersedia, namun bila budaya kepatuhan lemah, kualitas input data buruk, pelatihan kurang, atau proses masih sering “dibypass”, maka perbaikan tata kelola keuangan tidak berkembang sekuat yang diharapkan.

Selain itu, studi pada konteks reformasi manajemen keuangan publik juga menunjukkan adanya resistensi dan “counter conduct” dari aktor lokal terhadap paket reformasi teknomanajerial berbasis sistem. Dalam kasus IFMIS, aktor dapat melakukan penyesuaian, negosiasi, atau praktik tandingan yang membuat tujuan penguatan disiplin fiskal dan kontrol tidak sepenuhnya tercapai (De Clerck Azure et al., 2024). Kondisi tersebut menjelaskan mengapa beberapa penelitian dapat menemukan dampak yang tidak sesuai harapan desain sistem, karena efektivitas sistem pada akhirnya bergantung pada bagaimana sistem benar benar dipakai, bukan sekadar diimplementasikan. Perbedaan hasil juga dapat muncul karena variasi spasial dan temporal. Studi terbaru menunjukkan bahwa pengaruh e government terhadap korupsi dapat berbeda antarwilayah dan periode waktu, sehingga efektivitas inisiatif digital dan hasil tata kelolanya tidak selalu seragam (Dang et al., 2025). Dengan demikian, sekalipun penelitian ini menemukan hubungan yang menguatkan tata kelola keuangan, hasil yang berbeda pada penelitian lain dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan kematangan implementasi, kualitas tata kelola data, kapasitas SDM, dukungan pimpinan, dan dinamika institusional.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus hubungan mikro di level organisasi, yaitu efektivitas sistem informasi sebagai persepsi dan pengalaman pengguna, lalu dikaitkan langsung dengan tata kelola keuangan sebagai praktik internal. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menilai digitalisasi pada level makro, misalnya e government dan korupsi lintas negara, sehingga penjelasan mekanisme internal organisasi sering tidak menjadi fokus utama (Andersen, 2009; Khan et al., 2021). Penelitian ini juga berbeda dari studi yang menekankan tata kelola TI sebagai variabel intervening. Sebagai contoh, penelitian di pemerintah lokal Indonesia menyoroti peran tata kelola TI sebagai penghubung bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi, sehingga fokusnya tidak langsung pada efektivitas sistem informasi keuangan sebagai pendorong utama (Sofyani et al., 2020).

Di sisi lain, penelitian yang menekankan akuntabilitas sebagai keluaran IFMIS tetap penting, namun penelitian ini memperluas fokus pada tata kelola keuangan yang lebih komprehensif. Hal ini relevan dengan agenda riset yang mendorong akuntabilitas tidak lagi berada “di pinggir” analisis empiris, melainkan diposisikan sebagai hasil nyata yang dapat dijelaskan oleh desain dan efektivitas sistem serta praktik organisasi (Aquino, 2024). Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi model keberhasilan sistem informasi dalam menjelaskan manfaat organisasi pada konteks sektor publik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan meta review yang menekankan perlunya bukti empiris kontekstual karena hubungan dalam model keberhasilan sistem informasi tidak selalu diterapkan dan tidak selalu terkonfirmasi secara konsisten lintas studi (Jeyaraj, 2020). Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan melalui sistem informasi membutuhkan perhatian pada efektivitas sistem sebagai pengalaman pengguna. Upaya organisasi sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas informasi, stabilitas dan integrasi sistem, serta dukungan layanan dan pelatihan agar sistem benar benar menjadi dasar kontrol dan akuntabilitas, bukan sekadar alat administrasi (DeLone & McLean, 2003; Attiogbe et al., 2025).

Pembahasan ini menempatkan hasil penelitian pada kerangka konseptual dan bukti empiris terdahulu, namun dinamika tata kelola sektor publik sangat kontekstual. Studi lanjutan dapat memperkaya pemahaman melalui desain longitudinal, memasukkan faktor organisasi seperti dukungan pimpinan, budaya kepatuhan, dan tata kelola data, serta mengombinasikan persepsi pengguna dengan indikator proses yang lebih objektif. Hal ini penting mengingat literatur menunjukkan variasi hasil dan mekanisme yang berbeda antar konteks dan periode (Dang et al., 2025; Khan et al., 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas sistem informasi terhadap tata kelola keuangan pada konteks pengelolaan keuangan sektor publik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem informasi memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola keuangan. Sistem informasi yang dipersepsikan efektif oleh pengguna mampu mendukung tersedianya informasi keuangan yang lebih akurat, konsisten, dan tepat waktu, sehingga proses pelaporan, pengawasan, dan pengendalian keuangan berjalan lebih tertib. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memahami peran efektivitas sistem informasi dalam memperkuat tata kelola keuangan dapat

dinyatakan tercapai, karena sistem informasi yang efektif mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan kualitas pengendalian dalam praktik pengelolaan keuangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi kerangka keberhasilan sistem informasi dalam menjelaskan bagaimana manfaat sistem tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi dapat berujung pada perbaikan tata kelola organisasi, khususnya pada pengelolaan keuangan sektor publik. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi sebagai pengalaman pengguna merupakan faktor penting yang menjembatani kualitas sistem dan informasi dengan keluaran organisasi berupa tata kelola yang lebih baik. Secara praktis, penelitian ini mengisyaratkan bahwa instansi perlu memfokuskan penguatan pada aspek yang membentuk efektivitas sistem, seperti kualitas informasi yang dihasilkan, kemudahan penggunaan, stabilitas dan integrasi sistem, serta dukungan layanan dan pelatihan pengguna. Ketika aspek tersebut dijaga secara konsisten, sistem informasi akan lebih mampu menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kontrol internal serta disiplin proses dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, data yang digunakan berbasis persepsi responden melalui kuesioner, sehingga hasil sangat bergantung pada pengalaman dan penilaian subyektif pengguna sistem. Kedua, penelitian dilakukan pada satu periode waktu, sehingga belum menggambarkan dinamika perubahan efektivitas sistem dan tata kelola keuangan dari waktu ke waktu. Ketiga, variabel yang diuji difokuskan pada hubungan langsung antara efektivitas sistem informasi dan tata kelola keuangan, sehingga faktor lain yang berpotensi memengaruhi tata kelola keuangan, seperti budaya organisasi, dukungan pimpinan, kualitas SDM, tata kelola TI, atau regulasi internal, belum dimasukkan dalam model penelitian. Keempat, ruang lingkup objek penelitian yang spesifik pada instansi tertentu dapat membatasi generalisasi hasil ke instansi atau daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain longitudinal agar dapat menangkap perubahan efektivitas sistem informasi dan dampaknya terhadap tata kelola keuangan secara lebih komprehensif. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel organisasi yang relevan, seperti dukungan manajemen puncak, kompetensi pengguna, budaya kepatuhan, tata kelola TI, dan kualitas tata kelola data, sehingga model dapat menjelaskan fenomena secara lebih luas dan realistis. Penelitian mendatang juga disarankan mengombinasikan data persepsi dengan data objektif, misalnya ketepatan waktu pelaporan, kualitas rekonsiliasi, tingkat temuan audit, atau kepatuhan prosedural, agar hasil lebih kuat dan mengurangi potensi bias persepsi. Terakhir, perluasan objek penelitian pada beberapa instansi atau wilayah berbeda akan membantu menguji konsistensi temuan dan meningkatkan daya generalisasi, sekaligus memungkinkan analisis perbandingan tingkat kematangan implementasi sistem informasi keuangan di berbagai konteks sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addo, A. A., & Avgerou, C. (2021). Information technology and government corruption in developing countries: Evidence from Ghana customs. *MIS Quarterly*, 45(4), 1833–1862. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2021/14838>
- Andersen, T. B. (2009). E-government as an anti-corruption strategy. *Information Economics and Policy*, 21(3), 201–210. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2008.11.003>
- Aquino, A. C. B. (2024). Accountability from the periphery to the centre of the local government research agenda. *Local Government Studies*, 50(6), 1129–1142. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2415683>
- Attigbo, D. A., Arhin, E. Y., & Marfo-Yiadom, E. (2025). Ghana's integrated financial management information system and public sector accountability. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2499208. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2499208>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155–159. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155>

- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Dang, T. C., Van, H. V., & Van, D. L. (2025). E-government and corruption in an emerging country: New perspectives from a spatiotemporal approach. *International Review of Economics & Finance*, 100, 104111. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104111>
- De Clerck Azure, J., Alawattage, C., & Lauwo, S. G. (2024). Politics of fiscal discipline: Counterconducting the World Bank's public financial management reforms. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 37(4), 1012–1040. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2022-5761>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.1177/002224378101800104>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Jeyaraj, A. (2020). DeLone & McLean models of information system success: Critical meta-review and research directions. *International Journal of Information Management*, 54, 102139. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102139>
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120737. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*, 28(1), 227–261. <https://doi.org/10.1111/isj.12131>
- Petter, S., DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2008). Measuring information systems success: Models, dimensions, measures, and interrelationships. *European Journal of Information Systems*, 17(3), 236–263. <https://doi.org/10.1057/ejis.2008.15>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Tetteh, L. A., Agyenim-Boateng, C., Simpson, S. N. Y., & Susuawu, D. (2021). Public sector financial management reforms in Ghana: Insights from institutional theory. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(5), 691–713. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2020-0134>